

HAK MEWARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Ismawati Septiningsih,SH,MH

Fakultas Hukum - Universitas Surakarta

Email : septiningsihisma@yahoo.co.id

ABSTRAK: Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan pasal 874 BW, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Sedangkan ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Harta waris adalah hal – hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak – hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa: aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti, hak cipta); dan passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya).

Di dalam sistem pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak termasuk di dalam ahli waris golongan pertama. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil sebagai ahli waris yang mendapat bagian warisan dari pewaris.

Anak luar perkawinan, yaitu anak yang telah dilahirkan sebelum kedua suami istri itu menikah atau anak yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri dengan orang lain sebelum mereka menikah. Anak luar perkawinan ini terbagi atas: anak yang disahkan yaitu anak yang dibuahkan atau dibiakkan di luar perkawinan, dengan kemudian menikahinya bapak dan ibunya akan menjadi sah, dengan pengakuan menurut undang – undang oleh kedua orang tuanya itu sebelum pernikahan atau atau dengan pengakuan dalam akte perkawinannya sendiri; sedangkan anak yang diakui yaitu dengan pengakuan terhadap seorang anak di luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya tau dengan kata lain, yaitu anak yang diakui baik ibunya saja atau bapaknya saja atau kedua – duanya akan memperoleh hubungan kekeluargaan dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akte kelahiran anak atau pada saat perkawinan berlangsung atau dengan akta autentik atau dengan akta yang dibuat oleh catatan sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU - VIII / 2010 Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Tidak hanya sah hubungan sipil anak dengan ayah kandungnya tetapi juga menyediakan kepastian memastikan kebutuhan dan kepentingan anak-anak di luar pernikahan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Anak Diluar Perkawinan.

A. Latar Belakang

Seorang anak memberikan peranan yang penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan awal pada saat melangsungkan perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, untuk mempersatukan dua keluarga besar, serta untuk meneruskan keturunan. Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.¹

Menurut hukum keluarga, kelahiran seorang anak akan menjadi awal dari timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam hal perwalian, akan timbul hak dan kewajiban pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin.

Secara fitrah alamiah tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subyek hukum yang harus dilindungi oleh Negara dan undang-undang. Perbedaan status dan kedudukan yang diciptakan oleh

hukum semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan sepihak dan parsial. Seharusnya hal itu tidak terjadi agar setiap anak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan seorang anak.

Dengan dikeluarkannya *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka terdapat beberapa perubahan terhadap hak dan kedudukan anak, salah satunya adalah akibat hukum perkawinan terhadap hak menuntut warisan bagi anak luar kawin. Dalam ketentuan BW (*Burgerlijk Wetboek*), anak di luar kawin yang telah diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak-anak sah lainnya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi hak dan kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*)?
- b. Apakah perbedaan antara hak mewaris anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

2. Batasan Masalah

Karena mungkin masalahnya sangat besar dan pembahasan bisa meluas, maka penulis perlu membatasi bagian kecil saja yang mungkin bisa jadi jurnal pendek.

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan hak dan kedudukan anak luar kawin ditinjau menurut hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*).
- b. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan perbedaan hak mewaris anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

4. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi lembaga, yakni lembaga perkawinan dan lembaga administrasi penduduk diharapkan meningkatkan perhatiannya

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986 : 28

terhadap hak dan kedudukan anak luar kawin, khususnya dalam hal hak mewaris anak luar kawin, pasca *judicial review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- b. Bagi masyarakat umum, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kedudukan hukum anak luar kawin di mata hukum. Sehingga nantinya stigma negatif yang saat ini disandang oleh anak-anak luar kawin, baik di mata hukum maupun di mata masyarakat umum bisa sedikit mereda dan bahkan menghilang.

5. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Fakta yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan yang masih berlaku. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Undang-undang dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, BW (*Burgerlijk Wetboek*), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Kerangka Teori

BW (*Burgerlijk Wetboek*) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai perkawinan secara jelas. Hanya saja, dalam Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) memberikan batasan perkawinan sebagai berikut : Undang-undang tidak memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut dapat diketahui bahwa BW (*Burgerlijk Wetboek*) memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai berikut :

Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

Oleh karena itu, menurut Pasal 81 BW (*Burgerlijk Wetboek*), untuk melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 76 BW (*Burgerlijk Wetboek*) :

Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat, di hadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia.

Batasan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut juga tertuang dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) baru atau NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) dalam Buku I Titel 5 Pasal 30, yaitu : *De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen (undang-undang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan belaka).*

Berdasarkan Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Buku I Titel 5 Pasal 30 NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) tersebut dapat disimpulkan bahwa hidup bersama tanpa perkawinan pun dapat dicatatkan di hadapan pegawai pencatat.³ Hal tersebut dikarenakan perkawinan menurut konsep Pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Buku I Titel 5 Pasal 30 NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) hanya sebagai hubungan perdata belaka. Konsep perkawinan menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) berbeda dengan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*) yang mulai berlaku pada tanggal

² (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 35).

³ (Djaja S. Meliala, 2012 : 49).

2 Januari 1974 tetapi berlaku efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh kedua calon mempelai Perkawinan tersebut juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut seperti halnya BW (*Burgerlijk Wetboek*) juga menganut asas monogami. Hanya saja, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dikatakan menganut asas monogami terbatas (asas monogami terbuka). Lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk berpoligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Asas hukum lain yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah:

1. Asas persetujuan kedua belah pihak.

Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah

pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

2. Asas proporsional.

Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas dimana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kelahiran si anak banyak yang berasal dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, antara lain dari peristiwa kelahiran dapat menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi **NOMOR 46/PUU-VIII/2010** Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; sehingga ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

⁴ (selanjutnya disebut sebagai *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pokok persoalan dalam hukum keluarga menyangkut asal usul keturunan seorang anak yang lahir di luar perkawinan bertumpu pada hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan itu telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus didahului dengan perbuatan apapun, kecuali terhadap apa yang disebutkan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang menganut prinsip pengakuan mutlak dimana seorang ibu biologis tidak secara otomatis akan menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa tindakan pengakuan. Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan asas pengakuan mutlak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Sehingga BW (*Burgerlijk Wetboek*) menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya.

Konsekuensi dari penerapan asas pengakuan mutlak bagi seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, secara hukum seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak akan memiliki orang tua tanpa adanya pengakuan dari keduanya. Bagi anak yang lahir dari perbuatan zina dan penodaan darah (sumbang) berdasarkan Pasal 272 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Pasal 283 BW (*Burgerlijk Wetboek*), kedudukan anak-anak tersebut tidak boleh disahkan dengan sebuah perkawinan maupun diakui oleh orang tuanya, kecuali apa yang telah disebutkan dalam Pasal 273 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Anak luar kawin menurut hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika kedua orang tua kandungnya melakukan pengakuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 272 dan Pasal 280

BW (*Burgerlijk Wetboek*). Bagi anak luar kawin sebagaimana tertuang dalam Pasal 283 BW (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu anak yang dilahirkan karena perbuatan zina dan penodaan darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka. Anak zina dan anak sumbang hanya akan mendapatkan hak nafkah hidup yang diukur berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli warisnya yang sah menurut undang-undang. Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan yaitu warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri jatuh ke tengah ayahnya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua masing-masing separuh bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.⁵

Sedangkan apabila anak luar kawin yang meninggal tersebut tanpa meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau istri dan kedua orang tua yang mengakuinya telah pula meninggal lebih dulu, maka barang-barang yang telah diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya jatuh kembali kepada keturunan sah dari ayahnya atau ibunya. Karena pada dasarnya, hubungan hukum itu hanya terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua yang telah mengakuinya, sehingga selain itu tidak ada hubungan keperdataan dengan anak luar kawin tersebut.

Berdasarkan hasil revisi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

⁵ Pasal 870 BW (*Burgerlijk Wetboek*),

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis demi hukum, namun hubungan keperdataan dengan pihak ayah tidak terjadi dengan sendirinya. Pihak-pihak yang berkepentingan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki yang dianggapnya sebagai ayah biologis itu benar-benar adalah ayahnya.

D. Kesimpulan

1. Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan asas pengakuan mutlak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Sehingga BW (*Burgerlijk Wetboek*) menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Melainkan dengan pengakuan dari kedua orang tua biologisnya.
2. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi **NOMOR 46/PUU-VIII/2010** hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis demi hukum Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Z. Ansori. 1986. ***Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia***. Jakarta: CV Rajawali.

Hasan Mustofa. 2011. ***Pengantar Hukum Keluarga***, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Meliala, Djaja S., ***Hukum Perdata Dalam Perspektif BW***, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Witanto, D. Y., ***Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan***, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini;

1. Nama : Ismawati Septiningsih, SH, MH
2. Tempat,tanggal lahir : Karanganyar, 28 September 1987
3. Alamat : Badranbaru Rt. 09 Rw. 08 Papahan Tasikmadu Karanganyar
4. Nomor Telp/ Hp : 085642154404
5. Email : septiningsihisma@yahoo.co.id
6. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Negeri 02 Papahan (1993-1999)
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 08 Surakarta (1999-2002)
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 05 Surakarta (2002-2005)
 - d. Perguruan Tinggi:
 - 1) Sarjana (S1) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) (2005-2009)
 - 2) Magister (S2) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik (2009-2011)

Surakarta, 02 Maret 2015

Ismawati Septiningsih, SH, MH

PERNYATAAN PUBLIKASI

Judul Artikel : Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Penulis : Ismawati Septiningsih,SH,MH

Yang bertanda tangan dibawah ini penulis makalah dengan judul yang disebutkan diatas:

Nama : Ismawati Septiningsih,SH,MH
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Alamat : Jalan Raya Palur KM 05 Surakarta

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan hak dan kewajiban yang melekat pada artikel tersebut.

Menyatakan tidak keberatan artikel dengan judul yang disebutkan diatas untuk dimuat dan dipublikasikan dalam Proceeding atau Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan editor berhak untuk mengedit sebagian dari isi tanpa merubah substansi makalah.

Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain tentang isi makalah yang telah dipublikasikan pada jurnal atau proceeding lain sebelumnya, maka sepenuhnya bukan merupakan tanggungjawab pengelola namun sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Surakarta, 02 Maret 2015
Yang membuat pernyataan

Ismawati Septiningsih,SH,MH



UNIVERSITAS SURAKARTA

PERNYATAAN PENULIS

Judul : Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Nama : Ismawati Septiningsih,SH,MH

1. Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan hak dan kewajiban yang melekat pada artikel tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum baik lewat seminar maupun jurnal oleh Universitas Surakarta.

Surakarta, 02 Maret 2015

Ismawati Septiningsih